

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Namun dalam praktiknya, akses pendidikan terutama pada jenjang pendidikan tinggi masih belum sepenuhnya merata, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang mengalami keterbatasan ekonomi dan informasi. Melalui pendidikan, masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir yang menjadi dasar peningkatan produktivitas serta partisipasi aktif dalam pembangunan dan ekonomi.

Pendidikan tidak hanya berfungsi meningkatkan kemampuan individu secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter serta pemberdayaan secara luas. Ketika akses dan kualitas pendidikan dapat dijangkau secara merata, maka peluang seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan akan semakin terbuka, sehingga mendorong pemerataan (Pradesa et al., 2024).

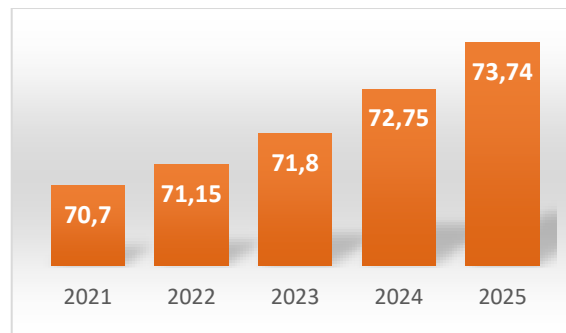
Pendidikan tinggi, sebagai salah satu jenjang pembelajaran memberikan ruang bagi individu untuk memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi profesional, agar nantinya dapat bersaing di pasar kerja yang semakin kompleks. Dengan demikian, pendidikan menjadi instrumen penting dalam pembangunan daerah dan nasional, karena tidak hanya meningkatkan kualitas manusia, tetapi juga mendukung perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih maju dan inklusif (Pradesa et al., 2024).

Selain itu, pendidikan dipandang sebagai pilar utama pembangunan bangsa karena fungsinya luas, mulai dari peningkatan kapasitas individu hingga pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran ganda, yaitu sebagai alat peningkatan kemampuan individu serta sebagai fondasi bagi pencapaian pembangunan yang lebih luas dan berkeadilan (Panoyo, 2024).

Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor minyak dan gas bumi (Putri, 2003). Namun, potensi ekonomi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah umumnya tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan karena mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Oleh sebab itu, perkembangan nilai IPM dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan manusia sekaligus menjadi dasar dalam menilai sejauh mana pembangunan, khususnya pada sektor pendidikan, telah berjalan secara merata.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah ini mencapai 73,74, meningkat 1,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun tergolong dalam kategori "tinggi", nilai IPM Bojonegoro masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 76,13 (Badan Pusat Statistik, 2025).

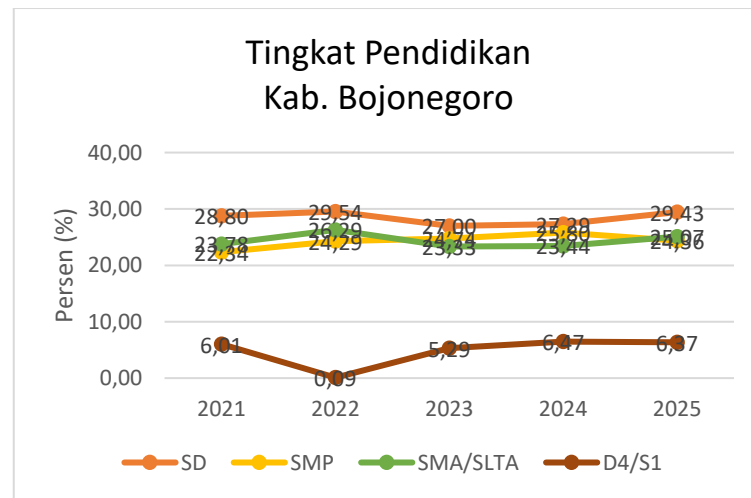
Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro 2021–2025



(Sumber: BPS Bojonegoro, 2025)

Dapat dilihat dari gambar diatas nilai IPM Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan secara bertahap, tahun 2021–2025 terlihat bahwa nilai IPM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, IPM Bojonegoro berada pada angka 70,70. Angka tersebut kemudian naik menjadi 71,15 pada tahun 2022 dan 71,80 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 IPM kembali meningkat menjadi 72,75, dan pada tahun 2025 mencapai 73,74. Peningkatan ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro mengalami perbaikan dalam lima tahun terakhir. Peningkatan IPM tersebut tentunya didukung oleh beberapa dimensi penyusun, yang pertama Umur Panjang dan Hidup Sehat, kedua Pengetahuan, dan yang ketiga Standar Hidup Layak (Badan Pusat Statistik, 2025). Salah satu dimensi penting dalam IPM adalah dimensi pengetahuan yang berkaitan dengan capaian dan partisipasi pendidikan kepada masyarakat. Untuk memahami kondisi tersebut secara lebih komprehensif, maka perlu dilihat bagaimana tingkat pendidikan kabupaten Bojonegoro dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 2. Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Bojonegoro 2021 - 2025



(Sumber: BPS Bojonegoro, 2025)

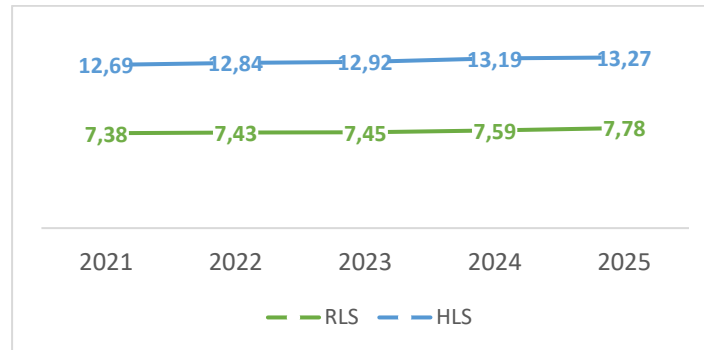
Dapat dilihat dari grafik diatas mengenai tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro selama periode 2021-2025, terlihat adanya perubahan yang berlangsung secara bertahap pada setiap jenjang pendidikan. Persentase penduduk dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) berada pada kisaran 28-29 persen dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2021 tercatat sebesar 20,80 persen dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 29,43 persen. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), persentasenya relatif lebih stabil di angka 22-24 persen. Sementara itu pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA) berada pada kisaran 23-25 persen. Adapun penduduk yang menempuh pendidikan tinggi (D4/S1) masih berada pada rentang 5-6 persen.

Namun demikian, persentase penduduk yang menempuh pendidikan tinggi masih berada pada kisaran 5–6 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi belum tersebar

secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, meskipun indikator pendidikan dalam IPM mengalami peningkatan, perlu adanya upaya yang lebih terarah untuk memperluas dan memperkuat akses pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi agar manfaat pembangunan pendidikan dapat dirasakan secara lebih luas.

Pada salah satu dimensi peningkatan IPM yaitu pengetahuan, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Menurut Badan Pusat Statistik (2022) rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dapat diperkirakan bahwasanya dalam kondisi yang normal rata-rata lama sekolah dalam suatu wilayah yang tidak akan turun. Jangkauan penduduk yang terhitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah 25 tahun keatas. Rata-rata lama sekolah berfungsi untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat di wilayah tersebut. Badan Pusat Statistik (2021) menyatakan angka harapan lama sekolah (HLS) adalah sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Pentingnya angka harapan lama sekolah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditujukan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.

Gambar 3. Grafik Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Bojonegoro 2021–2025



(Sumber: BPS Bojonegoro, 2025)

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dijelaskan antara Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan secara berdampingan dan stabil meskipun peningkatannya masih relatif lambat. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang mampu mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi hingga ke tingkat desa, sehingga peluang melanjutkan pendidikan tidak terpusat pada kelompok atau wilayah tertentu saja.

Sebagai bentuk upaya dalam pemerataan akses pendidikan tinggi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019. Dalam bagian menimbang peraturan tersebut dijelaskan bahwa program ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan motivasi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi di Kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian, secara normatif program ini merupakan salah

satu bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan masyarakat desa untuk mengakses pendidikan tinggi.

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Dalam petunjuk teknis dijelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah akibat keterbatasan biaya pendidikan, mewujudkan pemerataan ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang memerlukan, serta memberikan penghargaan dan apresiasi kepada mahasiswa Kabupaten Bojonegoro agar semakin termotivasi untuk meraih prestasi akademik. Dengan demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan pembiayaan pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong mahasiswa agar mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasinya.

Selain menjelaskan tujuan program, petunjuk teknis juga mengatur sasaran penerima beasiswa, yaitu mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, termasuk keluarga penerima PKH, KIP, KPM, maupun KPP, serta mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan diberikan dalam bentuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semester. Di samping itu, petunjuk teknis juga mengatur mekanisme seleksi, persyaratan administrasi, hak dan kewajiban penerima

beasiswa, serta ketentuan penghentian beasiswa apabila penerima tidak lagi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Realisasi penerima Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa menunjukkan variasi yang cukup besar di setiap kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sebaran Realisasi Penerima Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa di Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Penerima
1	Ngasem	17	100
2	Bubulan	5	31
3	Kedungadem	23	132
4	Gondang	7	41
5	Balen	23	196
6	Sekar	6	24
7	Kepohbaru	25	189
8	Kanor	25	185
9	Kapas	21	168
10	Temayang	12	80
11	Tambakrejo	18	85
12	Purwosari	12	52
13	Malo	20	64
14	Trucuk	12	81
15	Padangan	16	76
16	Kasiman	10	62
17	Kalitidu	18	109
18	Bojonegoro	18	153
19	Margomulyo	6	3
20	Dander	16	124
21	Sukosewu	14	104
22	Sugihwaras	17	111
23	Baureno	25	175
24	Sumberrejo	26	227
25	Ngraho	16	81
26	Kedewan	5	8
27	Ngambon	5	31
28	Gayam	12	77
	Total	430	2769

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, 2025)

Berdasarkan Tabel 1, realisasi penerima beasiswa yang tersebar di 28 kecamatan dengan total 430 desa/kelurahan, dengan jumlah keseluruhan

penerima sebanyak 2.769 mahasiswa. Sebaran tersebut menunjukkan variasi yang cukup besar antar kecamatan. Kecamatan Sumberrejo mencatatkan jumlah penerima tertinggi, yaitu 227 mahasiswa dari 26 desa, sedangkan Kecamatan Margomulyo mencatatkan jumlah terendah, yaitu hanya 3 mahasiswa dari 6 desa. Kecamatan Ngasem sendiri berada pada posisi menengah dengan 100 mahasiswa dari total 17 desa.

Selain dilihat dari sisi realisasi penerima beasiswa, pemilihan lokasi penelitian juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di masing-masing kecamatan, khususnya tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) Kabupaten Bojonegoro periode 2022–2025, persentase rumah tangga miskin (RTM) di Kecamatan Ngasem tercatat di atas 18%, menjadikannya salah satu dari tiga kecamatan dengan persentase kemiskinan tertinggi di Kabupaten Bojonegoro, setelah Kecamatan Ngambon dan Kecamatan Bubulan. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah Kota Bojonegoro yang hanya mencatat 4,4% RTM, sehingga menggambarkan adanya ketimpangan yang tajam antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Bojonegoro.

Sebagai pelengkap data kemiskinan yang bersumber dari DAMISDA, penulis juga menambahkan data terbaru berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Data DTSEN mengelompokkan jumlah keluarga dan individu berdasarkan tingkat kesejahteraan mulai dari Desil 1 (kelompok termiskin) hingga Desil 4 pada tiap

kecamatan. Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Ngasem tercatat memiliki 4.025 keluarga (11.354 individu) pada Desil 1, 3.262 keluarga (9.496 individu) pada Desil 2, 2.739 keluarga (7.822 individu) pada Desil 3, dan 2.390 keluarga (6.571 individu) pada Desil 4, dengan total keseluruhan mencapai 12.416 keluarga dan 35.243 individu.

Tabel 2. Jumlah Keluarga dan Individu Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Desil 1 sampai dengan Desil 4 Per Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro.

Jumlah Keluarga dan Individu Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Desil 1 sampai dengan Desil 4 Per-Kecamatan											
No	Kecamatan	Desil 1		Desil 2		Desil 3		Desil 4		Jumlah Keluarga	Jumlah Individu
		Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu		
1	Kedungadem	4.312	12.241	3.881	11.536	3.394	10.131	3.203	9.221	14.790	43.129
2	Tambakrejo	3.838	11.265	3.509	9.935	2.453	7.167	2.226	6.248	12.026	34.615
3	Ngasem	4.025	11.354	3.262	9.496	2.739	7.822	2.390	6.571	12.416	35.243
4	Ngraho	3.719	10.803	2.769	8.130	2.323	6.861	1.885	5.457	10.696	31.251
5	Sekar	3.071	8.295	1.754	4.814	1.140	3.045	738	1.947	6.703	18.101
6	Margomulyo	3.226	9.458	1.258	3.333	766	2.106	608	1.655	5.858	16.552
7	Dander	3.248	9.872	3.243	9.823	2.448	7.635	2.710	8.049	11.649	35.379
8	Sumberrejo	2.550	6.917	2.532	7.394	2.366	7.103	2.461	7.013	9.909	28.427
9	Balen	3.081	8.791	2.753	8.155	2.404	7.275	2.686	8.023	10.924	32.244
10	Malo	1.929	5.952	1.368	4.266	1.286	3.979	1.079	3.208	5.662	17.405
11	Kepohbaru	2.304	7.214	2.721	8.763	2.183	7.317	2.400	7.574	9.608	30.868
12	Sugihwaras	2.134	6.672	1.824	5.726	1.716	5.474	1.555	4.446	7.229	22.618
13	Baureno	2.057	6.895	1.840	6.243	2.441	8.312	2.642	8.433	8.980	29.883
14	Kanor	1.964	5.569	1.788	5.551	2.314	7.249	2.474	7.243	8.540	25.612
15	Sukosewu	2.104	6.057	1.819	5.329	1.344	4.087	1.507	4.350	6.774	19.823
16	Temayang	1.777	4.976	1.352	3.685	1.209	3.381	1.237	3.367	5.575	15.409
17	Gondang	1.610	4.487	1.311	3.683	1.065	3.086	956	2.661	4.942	13.917
18	Gayam	1.562	4.571	1.221	3.787	1.141	3.379	1.123	3.350	5.047	15.087
19	Purwosari	1.473	4.601	1.316	4.169	1.400	4.225	1.151	3.364	5.340	16.359
20	Padangan	1.710	5.325	1.536	4.634	1.392	4.282	1.412	4.182	6.050	18.423
21	Kalitidu	1.819	5.116	1.935	5.820	1.850	5.689	1.936	5.810	7.540	22.435
22	Ngambon	1.315	4.025	568	1.598	395	1.107	334	909	2.612	7.639
23	Kapas	1.245	3.723	1.217	3.802	1.526	4.617	1.759	5.185	5.747	17.327
24	Trucuk	1.470	4.493	1.385	4.221	1.249	3.840	1.279	3.700	5.383	16.254
25	Kasiman	1.157	3.448	1.014	3.093	1.171	3.624	1.150	3.382	4.492	13.547
26	Bubulan	923	2.710	590	1.650	562	1.551	434	1.159	2.509	7.070
27	Bojonegoro	1.167	3.591	1.265	3.850	1.259	3.902	1.888	5.468	5.579	16.811
28	Kedewan	659	2.047	392	1.186	396	1.186	425	1.231	1.872	5.650
Jumlah		61.449	180.468	51.423	153.672	45.932	139.432	45.648	133.506	204.452	607.078

(Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025)

Apabila dibandingkan dengan 27 kecamatan lain se-Kabupaten Bojonegoro sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut, Kecamatan Ngasem menempati peringkat ketiga tertinggi dari sisi jumlah individu pada Desil 1 sampai dengan Desil 4 (35.243 individu), setelah Kecamatan Kedungadem

(43.129 individu) dan Kecamatan Dander (35.379 individu), serta jauh di atas rata-rata kecamatan lainnya. Kondisi ini memperkuat gambaran bahwa Kecamatan Ngasem merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk berkesejahteraan rendah hingga menengah yang tergolong besar di Kabupaten Bojonegoro, sehingga relevan dijadikan lokasi penelitian evaluasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa.

Tingginya angka kemiskinan di suatu wilayah pada umumnya berkorelasi dengan terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, karena keterbatasan biaya menjadi salah satu faktor utama penyebab putus kuliah maupun rendahnya partisipasi pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Kondisi inilah yang mendasari pentingnya evaluasi terhadap Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa di Kecamatan Ngasem, mengingat program tersebut secara khusus dirancang untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi, namun realisasi penerima beasiswa yang justru berada pada posisi menengah dibandingkan kecamatan lain, muncul pertanyaan penting mengenai sejauh mana program ini benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan di wilayah dengan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, yaitu tingginya angka kemiskinan yang berpotensi menghambat akses pendidikan tinggi di satu sisi, serta terdapatnya kesenjangan antara kuota dan realisasi penerima beasiswa di sisi lain, Kecamatan Ngasem dipilih sebagai fokus penelitian karena dinilai representatif untuk mengevaluasi sejauh mana Program Beasiswa Sepuluh

Sarjana per Desa mampu menjawab persoalan pemerataan akses pendidikan di wilayah dengan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi.

Dengan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan program pada tingkat kecamatan menjadi penting untuk melihat sejauh mana alokasi kuota tersebut dapat terealisasi. Dapat dilihat dari kondisi di Kecamatan Ngasem yang terdiri dari 17 desa, maka kuota penerima beasiswa seharusnya mencapai 170 karena setiap desa memiliki 10 kuota. Namun berdasarkan data realisasi di lapangan, jumlah penerima beasiswa di Kecamatan Ngasem hanya sebanyak 100 mahasiswa, yang artinya masih terdapat selisih sebanyak 70 kuota yang belum terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan program beasiswa di Kecamatan Ngasem belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3. Sebaran Penerima Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa di Kecamatan Ngasem

KECAMATAN NGASEM			JUMLAH
1	DESA	BANDUNGREJO	6
2	DESA	BARENG	6
3	DESA	BUTOH	2
4	DESA	DUKOHKIDUL	8
5	DESA	JAMPET	9
6	DESA	JELU	10
7	DESA	KOLONG	9
8	DESA	MEDIYUNAN	2
9	DESA	NGADILUWIH	7
10	DESA	NGANTRU	10
11	DESA	NGASEM	3
12	DESA	SAMBONG	0
13	DESA	SENDANGHARJO	7
14	DESA	SETREN	5
15	DESA	TENGGER	3
16	DESA	TRENGGULUNAN	4
17	DESA	WADANG	9
JUMLAH			100

(Sumber: Dinas Pendidikan Bojonegoro 2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima kuota beasiswa di Kecamatan Ngasem belum sepenuhnya terpenuhi, dan hanya terealisasi sebanyak 100 mahasiswa. Artinya masih terdapat selisih 70 mahasiswa dari kuota yang seharusnya dapat terpenuhi. Selain itu, distribusi penerima antar desa menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Desa Jelu dan Ngantru masing-masing telah mencapai 10 penerima, sedangkan Desa Sambong belum memiliki penerima sama sekali, dan beberapa desa lainnya seperti Butoh dan Mediyunan hanya memiliki dua penerima.

Selain memperhatikan distribusi penerima beasiswa, penting pula untuk memahami kondisi pembangunan desa di wilayah penelitian. Pemahaman terhadap kondisi ini diperlukan agar pelaksanaan program tidak dipandang secara terpisah dari situasi sosial dan ekonomi masyarakat desa. Dengan melihat tingkat perkembangan desa, penelitian dapat memberikan gambaran mengenai lingkungan tempat kebijakan dijalankan serta dinamika sosial yang menyertainya.

Pemerataan akses pendidikan tinggi merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan sumber daya manusia. Program beasiswa menjadi instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Secara normatif, hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh beasiswa serta bantuan biaya pendidikan bagi yang tidak mampu. Ketentuan tersebut

diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan kewajiban pemerintah dalam memberikan dukungan pembiayaan pendidikan kepada mahasiswa.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menginisiasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa sebagai upaya memperluas kesempatan masyarakat desa untuk mengakses pendidikan tinggi. Melalui dukungan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa di setiap desa, program ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi sekaligus mendorong pemerataan akses pendidikan di wilayah pedesaan.

Untuk menilai pelaksanaan program tersebut, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn. Dunn mengemukakan enam kriteria evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam indikator tersebut digunakan secara keseluruhan dalam penelitian ini agar evaluasi dilakukan secara komprehensif. Efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana program mampu mencapai tujuan meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat desa. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya, termasuk anggaran dan mekanisme pelaksanaan, dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Kecukupan menilai apakah program telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat sasaran secara memadai. Pemerataan digunakan untuk melihat apakah manfaat program telah menjangkau kelompok yang membutuhkan secara adil. Responsivitas mengukur sejauh mana program mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara itu,

ketepatan menilai kesesuaian program dengan permasalahan yang melatarbelakanginya.

Penelitian oleh Oktaviani dan Rosdiana (2025) dalam Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik menekankan bahwa evaluasi kebijakan publik harus menilai kesesuaian antara tujuan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Mereka menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara perencanaan dan implementasi dapat mempengaruhi capaian kebijakan. Penelitian lain oleh (Martins & Toletina, 2024) juga menegaskan pentingnya evaluasi program daerah untuk memastikan distribusi manfaat berjalan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaannya. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas evaluasi program bantuan pendidikan, kajian yang secara khusus mengevaluasi program beasiswa daerah berbasis desa dengan menggunakan enam kriteria evaluasi William N. Dunn masih terbatas. Selain itu, penelitian yang mengkaji pelaksanaan program beasiswa daerah pada tingkat kecamatan dengan menyajikan variasi distribusi penerima antar desa juga belum banyak dilakukan.

Inilah yang menjadi kesenjangan dalam penelitian ini. Secara praktis, terdapat selisih antara kuota normatif 170 mahasiswa dan realisasi 100 mahasiswa di Kecamatan Ngasem. Perbedaan antara kuota ideal dan realisasi tersebut menjadi dasar penting dilakukannya evaluasi kebijakan. Meskipun secara regulasi tujuan program telah dirumuskan dengan jelas, namun pelaksanaannya di lapangan belum tentu sepenuhnya berjalan sesuai dengan

prinsip pemerataan yang diharapkan Secara distribusi, terdapat desa yang telah memenuhi kuota maksimal dan desa yang belum memperoleh penerima sama sekali. Secara akademik, penelitian yang mengevaluasi kebijakan beasiswa berbasis desa di tingkat kecamatan masih terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang sistematis untuk menilai pelaksanaan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa di Kecamatan Ngasem, khususnya dalam aspek efektivitas, efisiensi, dan pemerataan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program dalam mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian evaluasi kebijakan pendidikan pada tingkat kecamatan. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran dan merata.

Penelitian ini dibatasi pada evaluasi pelaksanaan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, dengan responden yang dibatasi hanya pada mahasiswa yang berstatus sebagai penerima beasiswa pada program tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak menggambarkan persepsi pihak lain seperti calon penerima yang tidak lolos seleksi, masyarakat umum, maupun pihak penyelenggara program.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini

yaitu : Bagaimana Evaluasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa Dalam Pemerataan Akses Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro Studi Kasus di Kecamatan Ngasem.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sendiri, adalah: “Untuk mengetahui bagaimana evaluasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa dalam pemerataan akses Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro Studi Kasus di Kecamatan Ngasem”

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian evaluasi kebijakan pendidikan di wilayah kecamatan, menilai efektivitas beasiswa untuk pemerataan akses pendidikan tinggi, serta memberikan kontribusi ilmiah pada ilmu pengetahuan sosial, khususnya administrasi publik. Hasilnya juga diharapkan menambah referensi tentang peran pemerintah daerah dalam mengurangi kesenjangan pendidikan di desa dan menawarkan perspektif baru dalam penerapan teori keadilan sosial pada bantuan pendidikan.

b. Manfaat praktis:

- 1) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah terkait efektivitas dan pelaksanaan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa, sehingga kebijakan pemberian beasiswa dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal dalam pemerataan akses pendidikan.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pelaksanaan program beasiswa di lapangan, khususnya dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa di Kecamatan Ngasem, sehingga masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan program tersebut secara optimal di masa mendatang.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur, mengenai penelitian berjudul Evaluasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa dalam Pemerataan Akses Pendidikan di Kabupaten : Studi Kasus di Kecamatan Ngasem disusun ke dalam lima bab utama dengan rincian sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal yang memaparkan alasan pemilihan topik melalui latar belakang masalah, identifikasi rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian bagi berbagai pihak, serta uraian singkat mengenai sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teoritis yang mendasari penelitian, seperti teori evaluasi kebijakan dan konsep pemerataan akses pendidikan. Selain itu, bagian ini memuat tinjauan penelitian terdahulu untuk memetakan posisi penelitian saat ini serta memperkuat kerangka analisis dalam membahas hasil temuan lapangan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan prosedur pelaksanaan penelitian secara ilmiah, meliputi jenis pendekatan yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, kriteria pemilihan responden, teknik pengumpulan data, hingga metode analisis data yang diterapkan untuk menjawab permasalahan penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan hasil temuan di lapangan yang mencakup profil program beasiswa di lokasi penelitian serta penyajian data yang telah diolah. Bagian pembahasan akan menganalisis sejauh mana pelaksanaan program dalam pemerataan pendidikan dengan menghubungkan temuan lapangan pada teori serta hasil riset sebelumnya.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan akhir yang ditarik secara ringkas dari seluruh hasil analisis guna menjawab rumusan masalah. Penulis juga menyertakan saran dan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah maupun pihak terkait agar implementasi program beasiswa dapat lebih optimal di masa depan.